

Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal di Kabupaten Kuala Kapuas

Dieky Fahreza Putra*, Saipudin

Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat

*dfahrezaputra@gmail.com

Abstrack

Researchers used multiple linear regression analysis methods, with 2 independent variables namely PAD, and DAU, using the dependent variable Capital Expenditures. The hypotheses proposed in this study are (1) PAD and DAU partially have a significant effect on capital expenditure, and (2) PAD and DAU have a significant effect on capital expenditure. This study indicates: (1) PAD has a significant effect in the level of 0.10 and has a positive impact on Capital Expenditure in Kuala Kapuas Regency during 2005-2017. (2) DAU variable has an insignificant effect but positively impacts Capital Expenditure in Kuala Kapuas Regency. (3) PAD and DAU jointly or simultaneously have a significant effect on capital expenditure.

Keywords: PAD, DAU, Expenditure

Abstrak

Peneliti menggunakan metode analisis regresi linier berganda, dengan 2 variabel bebas yaitu PAD, dan DAU, dengan menggunakan variabel terikat Belanja Modal. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah (1) PAD dan DAU secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dan (2) PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) PAD berpengaruh signifikan dalam taraf 0,10 dan memberikan dampak positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten Kuala Kapuas selama tahun 2005-2017. (2) variabel DAU berpengaruh tidak signifikan namun berdampak positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten Kuala Kapuas. (3) PAD dan DAU secara bersama-sama atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: PAD, DAU, Belanja Modal

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah menyatakan pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menunjang otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah berpedoman pada APBD dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya dimana terdapat pendapatan daerah dan belanja daerah yang dimuat dalam rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan melalui Perda (Suryani dan Pariani, 2018). Dalam melaksanakan pengelolaan APBD tersebut pada pemerintahan daerah, pemerintah daerah dalam mengalokasikan penggunaan pendapatan daerah cenderung menggunakannya untuk pengeluaran belanja rutin daripada menggunakan belanja modal yang dimana untuk membiayai pengeluaran tersebut menggunakan PAD dan DAU (Adytama dan Oktaviani, 2015).

Kabupaten Kuala Kapuas merupakan salah satu dari kabupaten yang terdapat di provinsi Kalimantan Tengah yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam sesuai otonomi daerah yang berlaku di Indonesia, salah satu bentuk pelaksanaan pemerintahan daerah pada Kabupaten Kuala Kapuas adalah pelaksanaan APBD berupa penyusunan pendapatan dan belanja daerah dan disusun, dibahas bersama oleh pemda dan dewan daerah setempat ditetapkan dengan perda setempat, kemudian perkembangan pendapatan daerah, dana alokasi umum dan belanja modal pada pemerintah Kabupaten Kuala Kapuas dapat diketahui pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal di Kabupaten Kuala Kapuas Tahun 2005-2017

Tahun	PAD (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)	DAU (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Belanja Modal (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2005	15459,52		204859,42		78981,45	
2006	14132,60	-9	401467,00	49	195468,15	60
2007	24670,00	43	436765,00	8	177876,00	-10
2008	22503,00	-10	481573,00	9	210633,00	16
2009	19407,00	-16	494403,00	3	204722,00	-3
2010	18410,00	-5	503442,06	2	197462,19	-4
2011	25547,00	28	572637,52	12	211733,62	7
2012	51109,57	50	660647,99	13	220514,22	4
2013	45913,00	-11	744617,00	11	265036,00	17
2014	72317,00	37	798733,27	7	312249,33	15
2015	89107,00	19	820035,00	3	412802,00	24
2016	85832,00	-4	881812,00	7	520040,00	21
2017	93717,00	8	866321,00	-2	467103,00	-11

Sumber :DJPK Kemenkeu RI

Berdasarkan **Tabel 1.1** diatas, menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah pada setiap tahunnya mengalami fluktuasi, dapat dilihat pada tahun 2009 ke 2010 pendapatan asli daerah mengalami penurunan sampai -5% namun ditahun 2011 pendaptan asli daerah naik sebesar 28% hal ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah di Kabupaten Kuala Kapuas mengalami ketidakstabilan. Hal tersebut juga terjadi pada dana alokasi umum dan belanja modal yang mengalami ketidakstabilan pada setiap tahunnya, bisa kita lihat pada tabel diatas. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pendapatan daerah berupa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dalam memberikan pengaruh terhadap belanja daerah berupa belanja modal pemerintah daerah Kabupaten Kuala Kapuas dengan

judul penelitian yaitu “**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten Kuala Kapuas**”.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini (1) bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara parsial terhadap belanja modal di Kabupaten Kuala Kapuas ? (2) bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan terhadap belanja modal di Kabupaten Kuala Kapuas.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini (1) untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara parsial terhadap belanja modal di Kabupaten Kuala Kapuas (2) untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan atau bersama-sama terhadap belanja modal di Kabupaten Kuala Kapuas.

KAJIAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber yang terdapat dalam pendapatan asli daerah (PAD) yang dipungut oleh pemerintah daerah menurut pasal 6 ayat 1 terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Dana alokasi umum

Tercantum pada Pasal 1 ayat 21 bahwa dana alokasi umum adalah dana yang disumbangkan dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasikan. Dilihat fungsi dasar umum yang diukur dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik bruto per kapita dan indeks pembangunan manusia, sedangkan kapisitas fiskal adalah sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil, Pasal 29 menjelaskan bahwa proposi DAU antar daerah provinsi dan Kabupaten atau kota ditetapkan berdasarkan imbangen kewenangan antara provinsi dan kabupaten atau kota.

Belanja Modal

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan belanja modal (BM) pengeluaran belanja daerah yang dilakukan pembelian atau pengadaan atau juga pembangunan aset-aset tetap daerah yang berwujud dengan nilai manfaatnya lebih dari satu tahun (12 bulan) yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan, bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Menurut Syaiful (2006) dalam Ningsasra (2016), belanja modal dapat dikategorikan menjadi 5 kategori belanja modal yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan irigasi dan jaringan, dan belanja modal fisik lainnya.

Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal

Daerah dengan sarana dan prasarana yang memadai dan layak maka akan memberikan pengaruh pada produktifitas masyarakat daerah tersebut sehingga investor akan tertarik untuk berinvestasi atau menanamkan modalnya pada daerah tersebut sehingga PAD diharapkan bisa memberikan pengaruh terhadap belanja

pemerintah daerah yang utamanya digunakan untuk penganggaran ke dalam belanja modal agar pelayanan publik dapat diberikan secara baik serta kesejahteraan masyarakat meningkat dengan menyediakan sarana dan prasarana memadai yang bersumber dari PAD tersebut karena masyarakat di daerah telah memberikan sedikit atau sebagianya uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak, retribusi dan lainnya (Ningsasra, 2016).

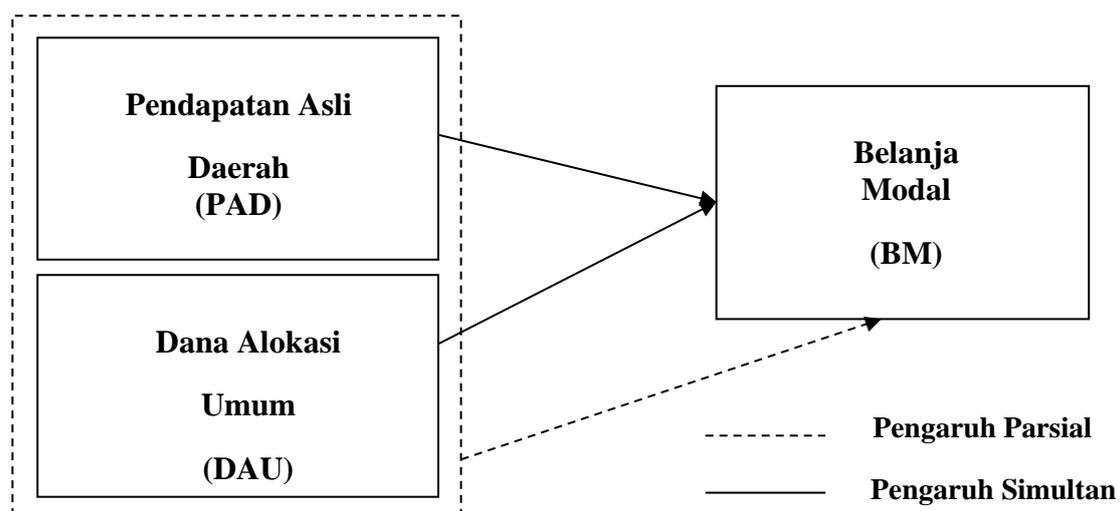
DAU diberikan oleh pemerintah pusat yang masuk ke anggaran daerah untuk memberi pelayanan publik kepada masyarakat yang dianggarkan melalui alokasi Belanja Modal, kemudian DAU juga memberikan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah untuk menunjukkan kemandirian keuangan suatu daerah karena semakin banyak DAU yang diterima maka kondisi keuangan daerah tersebut semakin tergantung terutama untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri sehingga daerah tersebut dapat dikatakan belum mandiri secara keuangan dan sebaliknya sehingga DAU akan memberikan pengaruh terhadap belanja modal (Ningsasra, 2016).

Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya pada penelitian di Propinsi Sulawesi Utara Periode 2009-2016 oleh Kakasih, Kawung, dan Tumangkeng (2018) menunjukkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap BM, DAU berpengaruh signifikan terhadap BM, PAD dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap BM, penelitian selanjutnya di Kabupaten dan Kota di Propinsi Riau oleh Suryani dan Pariani (2018) menunjukkan PAD berpengaruh signifikan terhadap BM dan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap BM, dan penelitian yang dilakukan oleh Ningsasra (2016) menunjukkan PAD berpengaruh positif terhadap BM dan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap BM tersebut.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka pertautan antar variabel dalam penelitian ini berupa kerangka konseptual berpikir yang disusun sebagai berikut.



Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis dapat diajukan dalam penelitian ini adalah (1) pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (BM) dan (2)

pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (BM).

METODE

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang terdapat dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dalam mempengaruhi belanja modal Kabupaten Kuala Kapuas Tahun 2005-2017.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian eksplanatif yang asosiatif adalah penelitian yang menjelaskan pengaruh dari dua atau lebih variabel.

Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan data yang digunakan merupakan data time series (runtut waktu), data sekunder merupakan data yang diperoleh dari lembaga atau instansi baik pemerintahan maupun swasta yang telah dipublikasikan atau telah diolah sebelumnya, sedangkan data time series (runtut waktu) adalah data yang diurutkan berdasarkan waktu pada sebuah subjek/objek penelitian.

Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuala Kapuas.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah hasil pendapatan daerah dari sumber ekonomi asli daerah dari pajak-pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD dalam penelitian ini dalam satuan juta rupiah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah jenis transfer dana perimbangan yang dirumuskan dengan alokasi dasar berupa jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah dan celah fiskal berupa kebutuhan fiskal daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. DAU dalam penelitian ini dalam satuan juta rupiah.

Belanja Modal

Belanja untuk menambah, merawat dan memperbaiki aset tetap daerah seperti tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya yang nilai periode akuntansinya lebih dari 12 bulan serta siap untuk digunakan. Belanja modal dinyatakan dalam satuan juta rupiah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini melalui *browsing* ke situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Teknik Analisis Data

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah model regresi dengan variabel bebas lebih dari satu (Amir, Junaidi, dan Yulmardi, 2009:236). Model persamaan analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$BM = \beta_0 + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \varepsilon$$

Keterangan:

BM = Belanja Modal	(Jutaan Rupiah)
PAD = Pendapatan Asli Daerah	(Jutaan Rupiah)
DAU = Dana Alokasi Umum	(Jutaan Rupiah)

β_0 = Konstanta
 β_1 = Koefisien PAD
 β_2 = Koefisien DAU
 ε = error

Uji Hipotesis

Uji t

Uji t adalah pengujian pada masing-masing variabel dalam modal dengan kaidah menggunakan nilai t hitung dan t tabel dimana jika t hitung > t-tabel maka tolak H_0 dan jika t hitung < t tabel maka terima H_0 (Amir, Junaidi, Yulmardi, 2009:110). Uji t juga dapat dilihat dengan prob t-hitung, dimana Prob. t hitung > 0,05 maka H_0 diterima dan jika t-hitung < 0,05 ditolak.

Uji F

Uji F adalah pengujian secara simultan atau bersama-sama pada variabel dalam model dengan kaidah menggunakan F-hitung dan F-tabel dimana jika F-hitung > F-tabel maka H_0 diterima, namun jika F-hitung < F-tabel maka H_0 ditolak. Uji F juga dapat dilihat dengan probabilitas F hitung dimana jika > 0,05 maka H_0 diterima namun jika < 0,05 maka H_0 ditolak.

Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Uji R^2 (koefisien determinasi) adalah uji yang menunjukkan variasi dari variabel terikat yang disebabkan oleh variabel bebas dimana untuk variabel bebas lebih dari dua menggunakan adjusted R^2 (Amir, Junaidi, dan Yulmardi, 2009:110).

HASIL DAN ANALISIS

Statistik Deskriptif

Tabel 2
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
(Dalam Juta Rupiah)

Statistik Deskriptif	PAD	DAU	BM
Rata-rata	44.471,13	605.177,9	267.278,5
Nilai Maksimum	93.717,00	881.812,0	520.040,0
Nilai Minimum	14.132,60	204.859,4	78.981,45
Standar Deviasi	30.621,45	208.155,4	126.786,1

Sumber : (data diolah dengan *views*)

Tabel 2 menunjukkan nilai statistik deskriptif variabel penelitian dengan ukuran rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi. Secara rata-rata PAD sebesar 44.471,13 juta rupiah, nilai tertinggi PAD pada tahun 2005-2017 terjadi pada tahun 2017 ini disebabkan karena pada tahun 2017 pendapatan tertinggi adalah dari segi pendapatan lain-lain yang sah, nilai terendah PAD sebesar 14.132,60 juta rupiah pada tahun 2006 ini disebabkan karena pajak daerah, retribusi daerah dan laba BUMN ini terlalu kecil. Standar deviasi PAD sebesar 30.621,45 juta rupiah. Secara rata-rata DAU sebesar 605.177,9 juta rupiah, nilai tertinggi sebesar 881.821,0 juta rupiah pada tahun 2016, nilai terendah sebesar 204.859,4 juta rupiah pada tahun 2005, dan standar deviasi DAU sebesar 208.155,4 juta rupiah. Secara rata-rata belanja modal sebesar 267.287,5 juta rupiah, nilai tertinggi belanja modal sebesar 520.040,0 juta rupiah pada tahun 2016, nilai terendah belanja modal sebesar 78.981,45 juta rupiah

terjadi pada tahun 2005, dan standar deviasi belanja modal sebesar 126.786,1 juta rupiah.

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa R² sebesar 0,872 persen. Ini berarti bahwa model tersebut dapat dikatakan baik, dimana sebesar 87,2 persen variabel bebas berupa PAD dan DAU bisa menjelaskan variasi perubahan variabel terikat berupa Belanja Modal dan sisanya 12,8 persen merupakan variabel yang berada diluar model ini.

Uji F

Hasil analisis dengan menggunakan software Eviews, diperoleh nilai probabilitas F Statistik sebesar 0,000034. Dengan taraf signifikansi 5% maka dinyatakan uji F signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Artinya Variabel PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Kuala Kapuas.

Uji t

Secara matematis model fungsi dari regresi linier berganda tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y=16651,13+2,275385PAD+0,246933DAU$$

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai nilai koefisien sebesar 2,275385, hal ini menunjukkan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah naik 1 Juta Rupiah maka Belanja Modal naik sebesar 2.275,385 Rupiah.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai nilai koefisien sebesar 0,246933, hal ini menunjukkan bahwa jika Dana Alokasi Umum naik 1 Juta Rupiah maka Belanja Modal naik sebesar 0.246,933 Rupiah.
3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak mengalami kenaikan dan penurunan atau bernilai nol maka Belanja Modal sebesar 16.651,13 juta rupiah.

Pembahasan

Pengaruh PAD dan DAU terhadap BM

Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sehingga modal dalam penelitian ini telah bersifat goodness of fit, artinya bahwa model penelitian ini layak digunakan dalam penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis ini sesuai penelitian dari Kakasih, Kawung, dan Tumangkeng (2018), Suryani dan Pariani (2018), dan Ningsasra (2016).

Pengaruh PAD terhadap BM

Berdasarkan pengujian statistik dengan uji-t. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai Probabilitas lebih besar dari 0,05 yakni sebesar 0,0734. Dimana pengujian ini membuktikan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan jika taraf signifikannya 0,10 terhadap Belanja Modal.

Pengaruh DAU terhadap BM

Berdasarkan pengujian statistik dengan uji-t, Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai Probabilita lebih besar dari 0,05 yakni sebesar 0,1709. Dimana pengujian ini membuktikan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

PENUTUP

Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini, menunjukkan PAD berpengaruh signifikan terhadap BM dan arah pengaruhnya bernilai positif, sehingga hal ini menggambarkan bahwa belanja modal pemerintah daerah Kabupaten Kuala Kapuas sudah dapat mensejahterakan masyarakat karena penerimaan PAD sebagai sumber ukuran kemandirian keuangan daerah guna mencapai kesejahteraan sudah berjalan dengan baik pengaruhnya signifikan dan memberikan dampak positif terhadap belanja modal. Dengan hasil ini diharapkan Pemerintah daerah Kabupaten Kuala Kapuas dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya dengan berbagai program dan perencanaan keuangan dan juga dapat meningkatkan belanja modal menjadi lebih efektif khususnya yang sumber pembiayaannya berasal dari PAD.

Pengujian hipotesis untuk dana alokasi umum berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal. Menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah terutama belanja modal tidak didominasi oleh DAU dalam pembiayaannya sehingga hal tersebut tidak menunjukkan adanya kemandirian keuangan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat karena pada dasarnya DAU hanyalah transfer untuk membantu kegiatan dan aktivitas pemerintah daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat tanpa adanya kontribusi nyata untuk memperbaiki perekonomian daerah, karena sumber pendapatan daerah yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan daerah adalah PAD, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Kuala Kapuas seharusnya menggunakan DAU dengan bijak sesuai kebijakan penganggaran yang lebih transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang terdapat didalam penelitian ini adalah variabel bebas yang digunakan hanya dua yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum sehingga diasumsikan masih terdapat variabel lainnya diluar dari penelitian ini yang dapat mempengaruhi belanja modal pemerintah Kabupaten Kuala Kapuas.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diatas, maka kesimpulan yang didapat adalah: (1) PAD berpengaruh signifikan dalam taraf 0,10 dan memberikan dampak positif terhadap BM di Kabupaten Kuala Kapuas selama tahun 2005-2017. (2) variabel DAU berpengaruh tidak signifikan namun berdampak positif terhadap BM di Kabupaten Kuala Kapuas. (3) PAD dan DAU secara bersama-sama atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap BM.

Saran

Saran yang didapat dalam penelitian ini: (1) Untuk pemerintah daerah agar senantiasa terus menggali sumber pendapatan asli daerah kemudian mengelola, memanfaatkan Dana Alokasi Umum untuk bisa meningkatkan mutu dari pelayanan publik didaerah. (2) Dari hasil penelitian ini, peneliti menyarankan kepada pemerintah agar tidak tergantung kepada dana alokasi umum dalam sumber pembiayaan program-program yang akan dilaksanakan atau pun operasional pemerintahan, hal ini bertujuan agar terciptanya kemandirian pemerintah di Kabupaten Kuala Kapuas. (3) Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah cakupan daerah kabupaten atau kota khususnya yang berada di provinsi Kalimantan Tengah, agar hasil penelitian yang dilakukan lebih mendalam dan menambahkan tahun penelitian supaya lebih akurat informasi yang diperoleh menambahkan variabel lainnya yang dapat berpengaruh terhadap belanja modal seperti dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.

BIBLIOGRAPHY

Abimanyu, (2005). Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Anggaran dan Belanja Daerah

Adytama, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 4(2), 190-205.

Amir, A., Junaidi, & Yulmardi. (2009). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*. Bogor: IPS Press.

Arif, B., Muchlis & Iskandar, (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Akademia.

Armando, K.R.; Kawung, George M.V.; Tumangkeng, Steeva Y.L. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sulawesi Utara Periode 2009-2016. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(2), 124-134.

Ghozali, Imam, Arifin Sabeni. 1997. *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan*. Edisi 4. Penerbit BPFE: Yogyakarta.

Halim, A., (2007 : 1996). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.

Ikhlas (2011). Dana Alokasi Khusus dalam pembiayaan Pembangunan. Salemba Empat, Jakarta

Koncoro (2007). *Akuntansi Sektor Publik : Konsep Untuk Pemerintah Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*.

Mardiasmo (2004 : 58) . *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta : Penerbit Salemba Empat

Ningsasra, Y. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 1-21.

Nurul (2008). *Analisi Kinerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Studi pada pemerintah kabupaten kudu*, Fakultas Ekonomi UNDIP, Semarang

Prakoso (2004). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung

Priambudi (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013*.

Saragih (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia

Simanjuntak (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMPYKPN, Yogyakarta, Thamrin, 2001

Subekan (2002). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : UII Press, 2001 Hal 171.20
Azwar & Subekan

Suryani, Febdwi; Pariani, Eka. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, 6(1), 11-22.

Syaiful (2016). Studi atas Belanja Modal pada anggaran Pemerintah Daerah.

Warsito, Rohman, A., dan Handayani, S., (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit UNDIP: Semarang